

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan suatu Negara bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembentukan sebuah negara adalah untuk melindungi kesejahteraan warga negaranya. Masyarakat mempercayai pemerintah dalam hal perencanaan, penetapan tujuan, dan pencapaian tujuan untuk membangun daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah hadir sebagai sebuah organisasi yang dipercayai oleh masyarakat untuk menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik. Semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus dilakukan dengan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga terciptanya pembangunan daerah. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, sehingga tujuan utama setiap pembangunan daerah adalah untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas suatu wilayah salah satunya dalam hal pembangunan manusia. IPM merupakan indeks gabungan yang digunakan untuk menilai kebutuhan manusia dalam tiga aspek utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang berkualitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Dwiyandari & Badera, 2018). Dengan adanya peningkatan kualitas standar hidup melalui pembangunan di suatu wilayah. Karena keberhasilan pembangunan di suatu

daerah akan ditentukan oleh seberapa baik masyarakat berkembang dalam berbagai cara yang dinilai oleh Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dalam hal ini untuk mendorong berbagai aspek pembangunan manusia. Kewenangan ini terkait dengan bagaimana pemerataan pembangunan, khususnya dalam program-program peningkatan taraf pembangunan masyarakat di daerah. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui tingkat pembangunan manusia yang dibutuhkan untuk kesejahteraan penduduk di daerahnya, maka pemerintah pusat memberikan otonomi penuh kepada mereka untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Hal ini sejalan dengan struktur pemerintahan berbasis desentralisasi di Indonesia. Dengan struktur ini, pemerintah pusat tetap bertugas mengatur dirinya sendiri sekaligus mengkoordinasikan kegiatan dengan pemerintah daerah. Karena adanya kewenangan tersebut, maka menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan warganya melalui rencana pembangunan daerah yang disusun. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang bagaimana anggaran dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa opsi yang tersedia bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan undang-undang ini dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan memberikan hak dan otonomi kepada daerah.

Otonomi daerah dapat digunakan untuk mengatur kebijakan daerah dan untuk mencapai pertumbuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab, ekonomis, dan efisien (Rante et al., 2018). Rencana penganggaran yang dibuat oleh

pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijadikan panduan untuk melakukan pengendalian pendapatan dan belanja dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, sangat penting untuk memahami seberapa besar tingkat kesejahteraan manusia akan meningkat jika pemerintah daerah berhasil melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu cara untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melihat rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dipraktikkan (Abdul, 2007). Rasio keuangan daerah akan menunjukkan bagaimana pengelolaan dan tata kelola kinerja keuangan suatu daerah. Karena Indeks Pembangunan Manusia dan keuangan daerah yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat akan berkorelasi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, banyak daerah di Indonesia yang menawarkan untuk menjadi daerah otonom baru. Salah satu pendekatan untuk lebih mengontrol upaya mendorong pertumbuhan dan kemakmuran daerah adalah melalui pengesahan UU No. 2 Tahun 1999. Salah satu strategi untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup di daerah adalah melalui pembentukan daerah otonom baru hal ini disebut juga dengan pemekaran daerah, yang memberikan kemampuan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang telah ada di wilayahnya masing-masing. Namun karena pemekaran daerah yang sangat besar menyusul pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah menetapkan strategi moratorium untuk menghentikan sementara laju pertumbuhan

DOB pada tahun 2009. Salah satu penyebabnya adalah tingginya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur seberapa baik kinerja masyarakat, adalah cara yang baik untuk mengukur seberapa baik perkembangan daerah yang baru dikembangkan dari waktu ke waktu. Diperkirakan bahwa setiap daerah akan diarahkan untuk bekerja menuju peningkatan kinerja pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Angka IPM digunakan untuk menunjukkan di mana dan berapa banyak pembangunan yang diinginkan di seluruh wilayah (Sholekhah, 2018).

Pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Padang Pariaman dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman dimekarkan menjadi Kabupaten Padang Pariaman pada 10 April 2002, dan Kabupaten Pasaman Barat dimekarkan pada tanggal 18 Desember 2003, menyusul dengan adanya pemekaran Kabupaten Pasaman pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Sijunjung dimekarkan menjadi Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Daftar Kabupaten dan Kota Pemekaran Provinsi Sumbar 2010-2021.

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia Daerah Pemekaran

Tahun	IPM				
	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kota Pariaman	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Pasaman Barat
2010	66, 56	55, 56	72, 56	64, 51	61, 77
2011	67, 40	55, 90	73, 07	64, 81	62, 55
2012	67, 76	56, 10	73, 47	65, 12	63, 33
2013	68, 71	56, 33	74, 51	65, 86	63, 92
2014	69, 27	56, 73	74, 66	66, 29	64, 56
2015	69, 84	57, 41	74, 98	67, 09	65, 26

Tahun	IPM				
	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kota Pariaman	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Pasaman Barat
2016	70,25	58,27	75,44	67,47	66,03
2017	70,40	59,25	75,71	67,81	66,83
2018	70,86	60,28	76,26	68,45	67,43
2019	71,52	61,26	76,70	68,94	68,21
2020	71,51	61,09	76,90	69,04	68,49
2021	71,76	61,35	77,07	69,23	68,76
Rata-Rata	69,65	58,29	75,11	67,05	65,59

Sumber : Sumbar BPS (data diolah 2023)

Berdasarkan tabel di atas, kabupaten dan kota hasil pemekaran di Sumatera Barat mengalami peningkatan IPM dari tahun 2010 hingga 2021. Walaupun belum meningkat secara signifikan, pertumbuhan yang diamati setiap tahunnya menunjukkan bahwa kabupaten / kota hasil pemekaran di Sumatera Barat berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Tabel 1. 2
Indeks Pembangunan Manusia Daerah Induk Pemekaran

Tahun	IPM			
	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Solok
2010	60,88	65,16	67,55	74,38
2011	61,57	65,89	67,97	74,78
2012	62,26	66,20	68,59	75,02
2013	62,91	67,15	69,07	75,54
2014	63,33	67,56	69,61	76,61
2015	64,01	68,04	69,87	76,83
2016	64,57	68,44	70,67	77,07
2017	64,94	68,90	71,13	77,44
2018	65,60	69,71	71,72	77,89
2019	66,46	70,59	72,39	78,38
2020	66,64	61,09	72,64	78,29
2021	66,77	70,76	72,88	78,41
Rata-Rata	64,16	67,45	70,34	76,72

Sumber : Sumbar BPS (data diolah 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa indeks pembangunan daerah induk pemekaran mengalami peningkatan pertumbuhan dari 2010 sampai 2021. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan daerah yang telah melakukan pemekaran mengalami peningkatan walaupun hasil peningkatannya belum terlalu signifikan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat bergantung pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita penduduk setempat. Tingkat bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan ukuran kapasitasnya untuk mengelola kinerja keuangannya. Seberapa baik pemerintah mengelola keuangannya dapat dinilai dengan beberapa cara, salah satunya melalui audit keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Analisis kinerja keuangan APBD membandingkan hasil dari satu periode ke periode sebelumnya untuk mencari tren. Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Rasio desentralisasi yang menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Temuan audit kinerja keuangan daerah merupakan informasi penting untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah menangani anggaran mereka. Evaluasi kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menentukan apakah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menawarkan layanan publik berkualitas tinggi. Untuk mendorong atau memotivasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola otonomi daerah, maka perlu dilakukan kajian terhadap kinerja keuangan daerah, baik dari sisi perhitungan pendapatan maupun bidang belanja. Kinerja keuangan yang lebih tinggi

dapat mendorong belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dwiyandari & Badera, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja keuangan dan keuangan kabupaten dan kota yang baru dibentuk di Sumatera Barat karena penelitian sebelumnya terutama mengukur kinerja keuangan kabupaten dan kota di tingkat provinsi dan hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya memiliki temuan yang tidak konsisten. Bagaimana hal itu mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa kemajuan daerah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga penulis ingin membuktikan sejauh mana pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Barat dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Periode 2010-2022**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010-2021?
2. Bagaimana rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010 - 2021?

3. Bagaimana Bagaimana rasio efektivitas PAD dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Bara 2010-2021?
4. Bagaimana rasio efektivitas pajak daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010-2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010-2021.
2. Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010-2021.
3. Untuk mengetahui rasio efektivitas PAD dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010-2021.
4. Untuk mengetahui rasio effektivitas pajak daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2010-2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut :

A. Manfaat Praktis

Penilaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat dan hubungannya dengan IPM periode 2010–2021, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

B. Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat menjadi sumber bagi para peneliti lain yang berkecimpung dalam kajian keuangan daerah dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya keuangan daerah di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dengan mengkaji derajat kemandirian daerah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, kajian ini dibatasi pada kemampuan keuangan daerah dan kota yang baru terbentuk di Sumatera Barat dan dikaitkan dengan IPM periode 2010 sampai dengan 2021. Ketiga variabel tersebut akan diteliti dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang dihitung dengan menggunakan rumus rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas pajak daerah. Kemudian, rasio keuangan ini akan diperhitungkan mengingat kabupaten yang baru dibentuk di Sumatera Barat dari tahun 2010 hingga 2021. Analisis regresi linier berganda akan digunakan untuk menguji hubungan antara rasio-rasio keuangan tersebut dengan angka IPM kabupaten dan kota pemekaran di Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, bagaimana masalah itu didefinisikan, tujuan dan manfaat dari penelitian, ruang lingkupnya, dan proses penulisan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan ringkasan informasi dalam penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori

Landasan teori penelitian meliputi pembangunan daerah dan indeks pembangunan manusia, serta daerah otonom, keuangan daerah, APBD, sumber pendapatan, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang definisi operasional penelitian dan ukuran variabel, variabel penelitian, metodologi pengumpulan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengukuran, analisis pengolahan data, dan pembahasan tentang bagaimana hasil temuan pengolahan data diinterpretasikan. Interpretasi temuan penelitian akan menawarkan solusi untuk masalah yang diangkat.

BAB V : Kesimpulan

Pada bab ini berisi rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan di masa mendatang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan temuan penelitian, batasan yang diamati selama penelitian, dan lainnya.